

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:

JUNAIDI^{1*}

NIM: E1011141097

Martoyo^{2*} Abdul Rahim^{3*}

*Email: junaidi@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Sungai Pinyuh, dikaji melalui aspek tepat keefektifan kebijakan, Tepat pelaksanaan, Tepat target dan Tepat lingkungan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) keberhasilan program BSPS, dilihat dari tepat keefektifan kebijakan di Kecamatan Sungai Pinyuh belum berjalan sebagaimana diharapkan. (2) Dilihat dari tepat pelaksanaan sudah berjalan dengan baik selama pelaksanaan pembangunan rumah. Tetapi disisi lain pelaksanaan program BSPS belum berjalan dengan lancar. (3) Dilihat dari tepat Target, belum sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti terbatasnya anggaran dan belum meratanya pendataan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. (4) Dilihat dari tepat lingkungan, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari kebersihan, ventilasi, luas bangunan, kualitas bahan, kerapian, dan kelengkapan ruangan. Adapun saran kepada pihak penyelenggara program BSPS untuk kedepannya dapat meningkatkan kinerja baik dalam pemberian atau penyampaian informasi yang up to date tentang program BSPS kepada masyarakat, agar masyarakat lebih paham atau mengetahui tentang sasaran, tujuan dan target program bantuan BSPS, dengan cara melaksanakan sosialisasi secara kontinyu.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan, Perumahan, Stimulan, Swadaya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu program yang dilahirkan oleh Pemerintah tentang pemenuhan kebutuhan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pada tahun 2014 melekat pada Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan angka kekurangan rumah (backlog) yang mencapai 13,5 juta, sebanyak 3,4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementara kebutuhan rumah untuk keluarga baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Jadi program ini untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan program BSPS harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan dan sebagai hasilnya mampu menjawab permasalahan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kecamatan Sungai Pinyuh. Manusia merupakan sumberdaya yang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika para aktor memiliki responsibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan. Selain sumberdaya manusia, juga dibutuhkan sumberdaya yang lain, seperti besarnya dukungan alokasi dana atau perangsang (incentive) untuk biaya peningkatan kualitas rumah.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan, sebab Pemda adalah pihak yang mengetahui berapa

jumlah kebutuhan hunian masyarakat. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara menyeluruh.

Tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh berdasarkan isi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkait dengan pelaksanaan isi kebijakan yang sesuai dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik program BSPS untuk melakukan perbaikan rumah berdasarkan ketentuan.

2. Identifikasi Masalah

Implementasi kebijakan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan. Adapun identifikasi masalahnya, antara lain:

- 1) Masyarakat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam Kelompok Penerima Bantuan (KPB) belum melaksanakan ketentuan yang ada, seperti dalam melakukan perbaikan rumah tidak dilakukan secara berkelompok.
- 2) Tidak adanya keterlibatan langsung Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari Tim Teknis dalam mengawal kegiatan BSPS sehingga jalur koordinasi dan komunikasi dengan instansi teknis tidak dapat terjalin dengan baik.
- 3) Fasilitator belum maksimal dalam melakukan peranannya selaku pengawasan dan bimbingan teknis kepada masyarakat penerima BSPS. Fasilitator adalah pelaksana yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai tenaga

pendamping masyarakat penerima program BSPS yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah atau terfokus, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada: Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Pinyuh dikaji melalui: Tepat Keefektifan Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan.

4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan ruang lingkup masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya yaitu: Bagaimanakah Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Pinyuh.

5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Pinyuh, dikaji melalui aspek tepat keefektifan kebijakan, Tepat pelaksanaan, Tepat target dan Tepat lingkungan.

6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik dari segi keilmuan maupun dari segi praktisi sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya menyangkut kebijakan publik.
- 2) Secara praktis,
 - a. Bagi peneliti diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam bentuk implementasi dan output terhadap pelaksanaan program bantuan

langsung stimulan perumahan swadaya masyarakat di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, sehingga akan dicarikan bentuk atau model pemberdayaan yang lebih praktis dan ideal di masa yang akan datang.

- b. Bagi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah, tim teknis kabupaten dan PPK fasilitator, dan pihak ketiga diharapkan dapat berlaku adil, jujur dan transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari masyarakat selaku kelompok sasaran (target group).
- c. Bagi masyarakat kelompok sasaran dapat bermanfaat bagi pengembangan pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih produktif dan mandiri serta mengarah pada pencapaian peningkatan nilai tambah dan keunggulan kompetitif.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Horn (dalam Wibawa, 2006:15), mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan didalam kebijakan.”

Menurut Riantnugroho (2009:56), Implementasi kebijakan merupakan “pengejawartakan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam undang-undang namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan keputusan perundangan.” Idealnya keputusan keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah

untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis yang melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku pelaksanaan kebijakan, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Model implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan bersifat politis. James Anderson (dalam Nugroho, 2013:92), menetapkan "model kebijakan publik meliputi formasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi dan evaluasi."

Menurut Winarno (2012:74), bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi antara lain:

- 1) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan;
- 2) Karakteristik-karakteristik badan pelaksana;
- 3) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi;
- 4) Para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan.

Berdasarkan pendapat Winarno tersebut, menunjukkan bahwa proses implementasi merupakan tahapan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan atau kebijakan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian, tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktifitas atau kegiatan dari program pemerintah.

Secara umum istilah kebijaksanaan atau policy dipergunakan untuk menunjuk

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Nugroho,2013:72). Pengertian istilah "kebijaksanaan ini, mungkin dianggap memadai untuk pembicaraan biasa, tetapi karena fokus perhatian kita adalah analisis kebijaksanaan publik secara sistimatis, maka kita memerlukan batasan dan konsep yang lebih tepat." Analisis mengenai pelaksanaan atau implementasi kebijakan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, (Dunn, 2003:132).

Berdasarkan analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn tersebut, maka salah satu analisis kebijakan yang berkaitan dengan masalah implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah analisis implementasi kebijakan, karena analisis ini, pelaksana kebijakan yang dilakukan dengan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, seperti berorientasi pada pemakai (client oriented) dan bukan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan semata-mata (Kuncoro, 2007:22).

Muhajir (dalam Azwar, 2012:34), menyatakan ada dua kebijakan yang berorientasikan kepada pemakai antara lain:

- 1) Kebijakan regulatif adalah "kebijakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Kebijakan yang demikian ini ditujukan untuk mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat dan mencapai perbaikan masa depan, sedangkan
- 2) Kebijakan alokatif adalah tindakan yang menumbuhkan masukan berupa uang, waktu, personil dan alat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan pemerintah dan masyarakat, terutama untuk mengecek apakah akuntabilitas proses formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan dapat diterima.

Implementasi kebijakan merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:21), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tidak semua kebijakan memerlukan proses implementasi, ada kebijakan yang secara otomatis akan terimplementasi dengan sendirinya begitu kebijakan tersebut diputuskan atau yang disebut self-implementation. Kebanyakan kebijakan memerlukan proses implementasi yang panjang rumit dan sulit.

Proses implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, sebagaimana dinyatakan Kambun (2013:35) yaitu :

- 1) Organisasi, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program
- 2) Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- 3) Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutindari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan ujuan program.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Kambun tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksananya. Perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Van Meter dan

Van Horn (dalam Wibawa, 2006:19), merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, dengan mambagi 6 (enam) indikator yang semuanya ini harus dicermati oleh seorang evaluator, yaitu:

- 1) Kompetensi dan jumlah staf;
- 2) Rentang dan derajat pengendalian;
- 3) Dukungan politik yang dimiliki;
- 4) Kekuatan Organisasi;
- 5) Derajat Keterbukaan dan kebebasan komunikasi;
- 6) Keterkaitan dengan pembuat kebijakan.

Keenam indikator tersebut, dapat ditelaah bahwa indikator terakhir menunjuk pada akses organisasi dalam mempengaruhi kebijakan. Keenam indikator tersebut membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan akhirnya dapat menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Pada proses pengambilan keputusan pelaksanaan program BPS diperlukan beberapa tahapan formal dan informal dengan beberapa faktor dengan kepentingan yang berbeda. Karakteristik kebijakan mempunyai pengaruh yang kuat terkadang setelah dilaksanakannya implementasi, hasilnya berbeda. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan untung rugi dari perubahan yang sangat kompleks, administratif, dan berjangka panjang sehingga menarik perdebatan antara inisiatif perubahan di arena publik dan birokrasi. (Agustino,2012:216).

Suharto (2008:97) mengemukakan "implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau instruksi presiden."

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditelaah bahwa kebijakan program BPS yang dikeluarkan pemerintah adalah merupakan pilihan tindakan yang positif yang diambil pemerintah karena tujuan

dilaksanakannya program ini adalah menaikkan derajat kehidupan masyarakat miskin, agar mereka dapat mengejar ketertinggalannya dengan kelompok masyarakat lain dalam satu pemukiman penduduk suatu kebijakan yang telah dirumuskan harus diimplementasikan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Tujuan dan rumusan kebijakan yang telah disusun secara baik dengan mematuhi prinsip-prinsip perumusan kebijakan dan telah disepakati oleh semua pihak, tidak akan memiliki makna apabila kebijakan hanya akan merupakan slogan yang indah yang akan berakibat pada tidak teratasinya masalah-masalah yang ada saat itu atau tidak tercapainya tujuan kebijakan yang seharusnya dapat diatasi melalui kebijakan yang diimplementasikan dengan baik.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Menurut Islamy (2007:5), berpendapat bahwa “kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga kebijaksanaan lebih tepat diartikan sebagai kebijakan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan

sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu proses kebijakan pemerintah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan demi berjalannya program pemerintah yang telah ditetapkan.

Menurut Hogwood and Lewis A. Gunn (dalam Abidin, 2014:52), secara umum proses kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
- 2) Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- 3) Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan pengertian kebijakan secara umum tersebut dapat diasumsikan bahwa kebijakan terdiri dari proses pembuatan kebijakan, implementasi, evaluasi yang merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan. Maka dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Abidin, (2014:18), menyatakan model implementasi kebijakan merupakan “proses kajian yang mencakup lima komponen dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu.” Kelima model implementasi kebijakan seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Sebagai contoh prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan

Adanya suatu kebijakan oleh pemerintahan yaitu berbagai proses dalam melakukan atau menjalankan suatu program pemerintah yang sedang berjalan maupun yang belum berjalan. Studi kebijakan model implementasi menurut Nugroho (2013:112) bahwa implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri. Nugroho mengajukan ada “empat tepat” yang dilihat dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adapun yang menjadi “empat tepat” tersebut ialah:

- 1) Tepat Keefektivan, terdiri dari:
 - a. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat, artinya dalam pelaksanaan suatu kebijakan ketepatan kebijakan yang menjadi faktor utama apakah kebijakan tersebut dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.
 - b. Perumusan kebijakan yang sesuai dengan masalah, artinya dalam perumusan kebijakan tersebut, harus mengerti akan sasaran yang akan dituju atau diselesaikan. Kemampuan dari kebijakan tersebut memecahkan permasalahan yang ada.
 - c. Kewenangan lembaga dalam pembuatan kebijakan, artinya kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang dan dalam pembuatan kebijakan tersebut apakah sesuai dengan karakter kebijakan.
- 2) Tepat Pelaksanaan, yaitu pada pelaksanaan kebijakan tersebut ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana yaitu pemerintah, pemerintah-masyarakat, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dalam kaitannya dengan pembagian hewan ternak ini sebaiknya adanya saling kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan tersebut.
- 3) Tepat Target, yaitu berkenaan dengan tiga hal yaitu apakah target yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah kebijakan tersebut tidak ada ketimpangan terhadap kebijakan lain, selanjutnya kesiapan dalam melaksanakan

kebijakan tersebut, dan yang terakhir apakah kebijakan tersebut baru dibuat atau memperbaharui implementasi kebijakan yang sebelumnya.

- 4) Tepat Lingkungan, yaitu ketepatan pemilihan lingkungan menjadi faktor berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Interaksi antara lembaga perumus kebijakan, dengan pelaksana kebijakan, dan dengan lembaga terkait.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nugroho tentang implementasi suatu kebijakan harus bersifat efektif dalam pelaksanaannya dan target yang akan diberikan bantuan harus tepat sasaran dan memperhatikan lingkungan implementasi kebijakan tersebut. Karena Implementasi kebijakan bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

2. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:789) diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo (2013: 89) program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek.

Sementara itu menurut Jones (2006:25) “program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumberdaya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern”.

Program merupakan seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumberdaya yang

tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan menurut Kunarjo (2013:89), bahwa suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

- a. Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur;
- b. Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran;
- c. Program dapat dihitung secara analisis cost benefit. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya.

Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam, sebagaimana dinyatakan oleh Munir (2012:11), antara lain:

- a. Ruang lingkup. Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.
- b. Ukuran (Size). Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.
- c. Durasi. Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.
- d. Kejelasan dan spesifikasi program input. Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.
- e. Kompleksitas tujuan. Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.

- f. Kebaruan program. Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Tujuan dari suatu program pada umumnya adalah pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2014:14). Suatu program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi akan memperbesar produktivitas dan alokasi sumberdaya yang lebih baik. Program harus dirancang untuk menjamin penggunaan sumber daya yang produktif, seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Di samping itu suatu program juga harus dirancang untuk mencapai tingkat efisiensi dan diarahkan untuk merubah kegagalan pasar yang menghalangi penciptaan pasar yang kompetitif dan disertai alokasi sumber daya yang ada akan menghasilkan output yang tinggi.

Pandangan lain menyebutkan, program merupakan rencana yang terperinci dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, dengan menyesuaikan tersedianya sumberdaya, waktu, dan lokasi sebagai upaya yang dapat dipertimbangkan. Daya kerja suatu program pembangunan yang berhasil menurut Kuncoro (2007: 239) adalah:

Fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu program, dan organisasi yang membantu, dengan istilah yang lebih khusus, program pembangunan akan dapat gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program: persyaratan program dengan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambil kebutuhan dari organisasi pembantu.

Apa yang diungkapkan oleh Kuncoro tersebut dikemukakan sebagai suatu persyaratan kelayakan dalam sebuah model kesesuaian (The Fit Model) yang disusun dengan pendekatan proses belajar (The learning process approach), sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan pemberdayaan rakyat

di segala sektor yang dinilai layak untuk dikembangkan, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Suatu program sebenarnya merupakan instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Program BSPS dapat diidentifikasi sebagai program peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berada di pesisir. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif (kelompok). Dalam kaitannya dengan program BSPS ini, karena proses pemberdayaan masyarakat ini lebih menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan.

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dunn (2003:11) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program ditentukan oleh policy content (isi kebijakan) dan context (konteks implementasi), yaitu:

- 1) Isi kebijakan atau program mencakup :
 - a. Kepentingan yang dipengaruhi,
 - a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
 - b. Derajat perubahan yang diinginkan
 - c. Kehendak pembuat kebijakan,
 - d. Siapa pelaksana program dan Sumber daya.
- 2) Sedangkan konteks implementasi mencakup Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa dan Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Implementasi kebijakan atau program bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan

dan siapa yang memperoleh apa dari implementasi kebijakan atau program merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Agustino (2012:18) ada empat lokal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program yakni:

- 1) Tingkat pendidikan rendah,
- 2) Kecemburuan sosial masyarakat
- 3) Adanya ketergantungan pemerintah desa kepada pemerintah daerah, dan
- 4) Kenaikan harga barang; dan kondisi alam.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut terhadap beberapa indikator yang mempengaruhi kebijakan atau program dimaksud untuk membantu memudahkan wacana didalam mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah, sifat dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:11) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel penelitian yang mandiri, baik satu atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Menyikapi penelitian diskriptif tersebut dalam kaitannya dengan penelitian ini menunjukkan bahwa suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek yang berkaitanya Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Langkah – Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tahap penelitian, yaitu:

- 1) Studi literatur, yaitu melakukan pengumpulan data – data melalui buku-buku, jurnal, artikel dan sumber internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Sungai Pnyuh Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah
- 2) Studi lapangan, yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah dimana dilaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Waktu Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan.

4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini tentang implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah,
- 2) Kepala Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman,
- 3) Kepala seksi Perumahan,
- 4) Camat Sungai Pnyuh,
- 5) Masyarakat yang menerima BSPS.

Teknik penentuan subjek penelitian, yaitu menggunakan teknik bertujuan atau purposive sampling. Menurut Arikunto (2013:139), bahwa pengambilan sampel atau subjek penelitian dengan teknik ini berdasarkan pada adanya tujuan tertentu, dengan syarat-syarat, yaitu: berdasarkan atas ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu.

Sedangkan objek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Sungai Pnyuh Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah.

5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan teknik antara lain:

- 1) Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung mengenai aktivitas dari objek yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan BSPS dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- 2) Teknik wawancara mendalam, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung dan komprehensif kepada subjek penelitian, yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah, Kepala Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman, Kepala seksi Perumahan, Camat Sungai Pnyuh, Lurah Sungai Pnyuh dan masyarakat yang menerima BSPS. guna pengumpulan data primer
- 3) Studi Dokumentasi, yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pemerintahan yang erat hubungannya dengan materi penelitian.

6 Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data sebagai instrumen utama (key instrument) dibantu dengan:

- 1) Pedoman observasi, yaitu catatan-catatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan pencatatan dilakukan saat pengamatan berlangsung.
- 2) Daftar pertanyaan (panduan wawancara) yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.
- 3) Dokumen, yaitu berupa alat bantu seperti kamera, tape recorder, foto copy dan lain-lain.

7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data selesai dikumpulkan, data-data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2012:92), sebagai berikut:

- a. Reduksi Data, yaitu suatu kegiatan proses penghalusan atau pemulihan data yang diperoleh di lapangan, proses tersebut untuk lebih menyederhanakan data yang diperoleh dengan memberi kode, mengklasifikasi, memilah-milah bagian-bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu setelah kegiatan reduksi dilakukan, kemudian data tersebut disajikan menjadi kumpulan informasi yang telah disusun, sehingga dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada umumnya penyajian data disajikan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dimengerti semua pihak.
- c. Melakukan verifikasi dan membuat kesimpulan. Verifikasi adalah mengedit kembali kebenaran data dan informasi yang ditulis sesuai dengan informasi yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat induktif, artinya merupakan pernyataan akhir yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

8 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan diolah dan diuji keabsahannya melalui triangulasi.

Menurut Patton (dalam Sugiyono, 2012:26), yaitu “data triangulation: dimana peneliti menggunakan beberapa sumber dengan data yang sama”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa teknik keabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Secara rinci peneliti akan menjelaskan penggunaan triangulasi sebagai berikut:

- 1) Triangulasi sumber dilakukan dengan pengecekan melalui beberapa sumber kemudian mengambil suatu kesimpulan dengan kesepakatan bahwa data yang diambil telah kredibel. Peneliti akan memberikan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda, hingga diperoleh data yang tidak berubah.
- 2) Triangulasi teknik merupakan data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara kemudian dicek kembali dengan teknik observasi. Jika pengujian tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar.
- 3) Triangulasi waktu merupakan pengecekan data yang dilakukan dengan waktu yang berbeda. Peneliti dapat melakukan wawancara di pagi hari saat kondisi informan masih segar sehingga akan memberikan data yang lebih valid. Untuk memperoleh kredibilitas data dapat dilakukan pengecekan data melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Teknik pemeriksaan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan data triangulasi sumber yaitu dapat dilakukannya dengan jalan 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 2) mengeceknya dengan berbagai sumber data dan 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Pada penelitian ini triangulasi dilakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih

dari satu pihak informan yang berasal dari elemen yang berbeda yakni, dari pemerintah dan masyarakat. Selain dilakukan triangulasi dengan berbagai sumber informan, juga dilakukan triangulasi dengan membandingkan data yang didapat dari wawancara, dokumentasi serta observasi yang dilakukan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tepat Keefektipan Kebijakan

Program BSPS adalah untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut, dengan mengarahkan proses pencapaian tujuan-tujuan program melalui bimbingan teknis yang salah satu tugas tersebut mengarahkan masyarakat agar mempergunakan dana yang menjadi haknya hanya untuk memperbaiki tiga atau dua komponen rumah yang sudah tidak layak atau rusak.

Ketepatan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Karena program tersebut belum dapat sepenuhnya memecahkan masalah program rumah tidak layak yang dicanangkan pada tahun 2018, sehingga tidak tercapainya suatu program yang tepat. Penyebabnya adalah: program tidak disertai dengan rencana operasional yang rinci dan kegiatan riil di lapangan, program bersifat top down dan berskala kecil dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian strategi implementasi program disamaratakan dengan tidak memprioritaskan wilayah sasaran.

Kondisi yang terlihat pada pelaksanaan pembangunan dalam program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh, diantaranya yaitu belum berjalan sesuai dengan diharapkan, hal ini dapat dilihat dalam pembangunan BSPS tersebut banyak dijumpai koordinasi antar pelaksana masih lemah, kurang pemahaman masyarakat terhadap program BSPS dan masih terdapat bantuan tidak sesuai peruntukannya.

Program BSPS belum tepat sasaran, karena pelaksanaan pembangunan dalam

program BSPS yang ada di Kecamatan Sungai Pinyuh belum berjalan secara maksimal karena belum sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi layaknya sebuah program yang tidak terlepas dari permasalahan pada tahap implementasinya, permasalahan yang terjadi dalam penetapan penerima BSPS adalah karena keterbatasan anggaran, masyarakat yang dapat diusulkan sebagai penerima bantuan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat sasaran yang ada, sehingga terjadi bias dalam pengajuan usulan dan verifikasi.

Ketepatan program BSPS, apabila dalam pelaksanaan suatu program tersebut dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Di samping itu, perumusan program yang sesuai dengan masalah, artinya dalam perumusan program tersebut, harus mengerti akan sasaran yang akan dituju atau diselesaikan. Kemampuan dari program tersebut memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam melaksanakan program BSPS.

Program BSPS yang telah dirumuskan sebelumnya belum dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada, karena penyelesaian suatu masalah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dukungan aturan dan program (rules and policies) pemerintah. Dalam hal ini, kemauan pemerintah (governmental will) dan legislatif berperan penting, selain lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Keefektipan implementasi program BSPS adalah bagaimana sikap konsisten para aktor dalam melaksanakan isi kebijakan, jika sikap konsisten tersebut tetap kuat dipegang oleh para aktor kebijakan maka kinerja (performance) kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung sesuai harapan dan tujuan dari isi kebijakan tersebut. Dengan demikian, masyarakat selaku sasaran kebijakan akan dapat merasakan manfaat dari adanya program BSPS tersebut.

Kewenangan lembaga pembuat program BSPS pada kenyataannya belum sepenuhnya membantu masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni. Hal tersebut terlihat dari beberapa masyarakat desa/kelurahan yang menerima BSPS tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah program BSPS yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

Pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh, khususnya di tiga desa dan satu kelurahan, yaitu Desa Sungai Bakau Besar, Desa Sungai Rasau dan Desa Sungai Batang serta Kelurahan Sungai Pinyuh, dilihat dari tepat keefektivan belum mencapai sasaran. Karena, Ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat miskin juga mencakup upaya program BSPS, demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

2. Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan program BSPS tersebut juga terlihat berbasis pada proyek atau kepentingan pribadi oleh pihak pelaksana. Program BSPS ini juga membuat banyak masyarakat berharap mendapat program bantuan tersebut, di samping kurang tegasnya tim teknis kabupaten dalam memberikan sanksi kepada fasilitator dan suplayer yang secara terbukti telah lalai

dalam melaksanakan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan kerugian pada masyarakat penerima BSPS. Tim teknis desa/kelurahan hanya mengejar keuntungan dari suplayer, dan suplayer menjadi enggan untuk datang ke lokasi BSPS yang mengakibatkan pendistribusian bahan bangunan milik MBR menjadi tidak lancar.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh implementor (pelaksana program) pada umumnya belum tepat pelaksanaan, karena berkaitan dengan ketepatan waktu, bahwa pelaksanaan penyuluhan akan diselenggarakannya program BSPS dilakukan dengan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan rencana yang ditentukan, baik sebelum atau sesudah mendapat program BSPS. Di samping itu, belum sepenuhnya tercapainya tujuan, bahwa pencapaian tujuan program BSPS dapat dilihat dengan tercapainya tujuan program BSPS tersebut yakni masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tergolong dibawah garis kemiskinan (miskin) masih ada yang belum mendapatkan bantuan program BSPS.

Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga yang menjadi pelaksana program BSPS yang belum mengarah kepada tepat pelaksanaan, karena masyarakat memberi respon negatif dengan adanya program BSPS melalui perbaikan rumah kurang layak huni ini, seperti masih adanya masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai masyarakat miskin yang tidak dapat membangun rumah yang layak huni, selama ini kebanyakan dari masyarakat berasumsi bahwa pemerintah hanya mengurus masalah-masalah kenegaraan di bidang ekonomi, politik saja tanpa mengetahui keadaan masyarakat tingkat bawah yang sebenarnya.

program BSPS yang diimplementasikan merupakan pemutakhiran konsep dari berbagai aspek, meliputi program, organisasi pelaksana, dokumen pendukung, dan pendanaan. program BSPS lahir dari iktikad baik untuk mengkaitkan seluruh komponen masyarakat, sehingga program yang diciptakan tidak semata-mata dari Pemerintah tetapi dari masyarakat dan didukung perencanaan anggaran yang mantap. Program BSPS yang tidak berhasil disebabkan adanya permasalahan teknis dan non teknis dari program sebelumnya digunakan sebagai rujukan penyusunan kegiatan pokok, kegiatan operasional dan rencana aksi program BSPS.

Program tersebut adalah program yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standart untuk dihuni, dengan dimaksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar. Kegiatan program BSPS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan memanfaatkan dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Mempawah.

Pelaksanaan sosialisasi sebagai langkah selanjutnya tentang keluaran program dalam hal ini implementasi program BSPS, kemudian memperlihatkan variabel-variabel dalam mekanisme pelaksanaannya yang merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan program tersebut terutama di Kecamatan Sungai Pinyuh. Namun kenyataannya masih dijumpai rumah penerima BSPS

yang belum siap ataupun masih setengah jadi disebabkan kekurangan dana sehingga, ini menjadi beban pikiran bagi penerima sedangkan, kemampuan mereka untuk merehab rumahnya sudah tidak cukup lagi.

Kurangnya dana yang diberikan untuk merehabilitasi rumah, sehingga penerima mengalami kesulitan untuk menyelesaikan rumah mereka. Mungkin tidak akan menjadi masalah bagi penerima yang memiliki sedikit tabungan untuk menambah kekurangan dari pembuatan rumah tetapi akan menjadi kendala apabila penerima tidak memiliki tabungan sehingga akan menjadi beban pemikiran bagi penerima karena harus mempersiapkan rumah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih sulit.

Pelaksanaan program BSPS belum sesuai dengan harapan masyarakat, waktu pelaksanaan program tidak mencukupi disebabkan oleh faktor cuaca dan keterlambatan pengantaran barang yang kehabisan stok. Faktor lainnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki penerima program karena harus bekerja.

Terkait dengan tepat pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh, menunjukkan bahwa hal fundamental yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program BSPS adalah program ini harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, masyarakat sebagai kelompok sasaran agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program BSPS, usulan kegiatan hendak lebih melihat apa yang memang dibutuhkan bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena

kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

3. Tepat Target

Program BSPS ini merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah daerah sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program BSPS ini merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah terhadap masyarakat miskin. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi starter pada masyarakat agar dapat memicu semangat dalam upaya, mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perumahan layak huni merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat miskin.

Pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh, belum teralisasi secara sesuai dengan paraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di samping itu, masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi BSPS secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa itervensi negative dari luar.

belum tepatnya sasaran atau target didalam pelaksanaan BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh. hal ini terlihat dari ada rumah yang belum layak mendapatkan bantuan menjadi mendapatkan bantuan, padahal kalau dilihat dari segi penghasilan penerima tersebut belum layak

mendapatkan bantuan, masih ada penerima yang mempunyai penghasilan yang lebih rendah. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat guna hal ini terlihat yang mendapatkan bantuan tidak mengalami perubahan.

program BSPS adalah bantuan yang ditujukan rumah yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati karena sudah terlalu banyak kerusakan pada rumah tersebut. Adapun tujuan dari proram BSPS adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan pepermukiman yang layak, dengan meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainya dalam penanganan kawasan/lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar dalam rangka mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat. Kegagalan program BSPS yang berdampak langsung dalam mengakselerasi pencapaian target program BSPS. Bantuan yang diberikan telah tepat kepada penerima yang membutuhkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat salah satu penerima yang mendapatkan BSPS dengan pendapatan yang tetap, bila dibandingkan dengan yang lain yang pendapatan tidak tetap dan lebih kecil maka seorang tadi belum berhak mendapatkan bantuan.

Adanya hambatan-hambatan tersebut maka akan melahirkan program-program yang baru dalam hal pembangunan pemberdayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh masih mengalami kendala-kendala dalam proses pencapaian pemerataan yang maksimal, seperti:

- a. Kurangnya maksimalnya pengawasan yang di lakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah, sehingga terdapat

- rumah yang telah mendapatkan bantuan namun belum ada perbaikan yang seperti diharapkan.
- b. Kurang selektifnya pendataan terhadap kelompok sasaran dalam menetapkan penerima BSPS sehingga ada penerima dengan pendapatan yang tetap dan lebih tinggi mendapatkan bantuan tersebut.
 - c. Pada kegiatan sarana prasarana masih juga terdapat kendala seperti susahnya untuk mendapatkan bahan utama dalam pembangunan, seperti kayu dan juga akibat langkanya bahan utama maka untuk mendapatkannya harus membayar dengan harga yang sangat tinggi

Kegagalan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh, terus terjadi akibat adanya ketidak transparan dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat selaku kelompok sasaran. Kegagalan pelaksanaan program ini menjadi bukti bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Pinyuh tidak dapat diimbangi dengan kebutuhan masyarakat miskin akan rumah layak huni. Kegagalan ini, sehingga tidak mencapai target (tepat terget) menunjukkan ketidakmampuan pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mendukung agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan lebih di sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan kegiatan.

4. Tepat Lingkungan

Tepat Lingkungan, merupakan ketepatan pemilihan lingkungan menjadi faktor berhasil atau tidaknya suatu program BSPS melalui suatu interaksi antara lembaga perumus program, dengan pelaksana program, dan dengan lembaga terkait. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Nomor: 07/PRT/M/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Gambaran mengenai peningkatan pola hidup sehat masyarakat. Tepat lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat Karas. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah.

pelaksanaan program BSPS belum dapat dikatakan berhasil, karena banyak bagian rumah yang belum dipasang. Barang-barang yang dibutuhkan tidak ada karena belum dikirim oleh pihak yang mengurus pembelianya. Pelaksanaan penyelenggaraan BSPS hanya membuat laporan hanya mengambil foto bagian depan rumah yang terlihat sudah siap sementara bagian disisi lain seperti bagian dalam rumah belum siap sama sekali. Pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh tersebut juga terlihat berbasis pada proyek atau kepentingan pribadi oleh pihak pelaksana. Persoalan ini tentu saja merupakan permasalahan yang secepatnya untuk diselesaikan, sebab dapat berdampak kurang baik dalam pelaksanaan program BSPS.

Kegiatan Program BSPS, mengenai tepat lingkungan, dimana BSPS adalah bantuan dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Sedangkan tujuan program BSPS adalah untuk penguatan kembali kesejahteraan masyarakat miskin yang ada

di Kecamatan Sungai Pinyuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adanya program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh sudah dirasakan adanya manfaat dari kegiatan pelaksanaan program BSPS tersebut, dimana yang dulunya rumahnya bocor sekarang tidak lagi, dulunya atap daun sekarang udah spandek, temboknya rumahnya atap sekarang udah pakai batu bata. Tetapi tidak semua penerima bantuan di Kecamatan Sungai Pinyuh merasakan manfaat yang didapatkan karena sebagian rumah penerima bantuan yang belum selesai dikerjakan. Namun mereka sedikit lebih nyaman dan tenang setelah rumahnya diperbaiki dengan mendapatkan rumah yang lebih layak dari sebelumnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab V, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

- 1) Keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dilihat dari tepat keefektifan kebijakan di Kecamatan Sungai Pinyuh belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat yaitu ketepatan program BSPS belum sepenuhnya dapat memecahkan permasalahan masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Pinyuh, seperti ketepatan waktu, bahwa pelaksanaan penyuluhan akan diselenggarakannya program BSPS dilakukan dengan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan rencana yang ditentukan, baik sebelum atau sesudah mendapat BSPS.
- 2) Keberhasilan program BSPS, dilihat dari tepat pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah

kepada masyarakat selaku kelompok sasaran atau penerima manfaat di Kecamatan Sungai Pinyuh sudah berjalan dengan baik selama pelaksanaan pembangunan rumah. Tetapi disisi lain pelaksanaan pembangunan program BSPS belum berjalan dengan lancar, karena adanya kendala-kendala seperti pengantaran barang atau bahan-bahan bangunan tidak lancar, penerima bantuan tidak diberi nota, tidak pernah tahu setiap pengeluaran barang yang dibeli. Sehingga pelaksanaan pembangunan rumah terhambat untuk siap dihuni.

3) Keberhasilan program BSPS, dilihat dari tepat Target, belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan fenomena dilapangan ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program BSPS masih saja ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti terbatasnya anggaran dan belum meratanya pendataan penerima BSPS. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Padahal kalau dilihat dari segi penghasilan dan kerusakan rumah bagi nama-nama calon penerima diatas telah layak untuk mendapatkan bantuan karena bantuan ini sangat dibutuhkan.

4) Keberhasilan program BSPS, dilihat dari tepat lingkungan, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari kebersihan, ventilasi, luas bangunan, kualitas bahan, kerapian, dan kelengkapan ruangan, serta sering terjadinya keterlambatan persediaan bahan material bangunan, sulitnya mencari ahli bangunan (tukang) yang sesuai dengan upah bayaran yang telah ditetapkan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan tersebut, maka disusunlah beberapa saran atau rekomendasi antara lain:

- 1) Dalam rangka meningkatkan tepat keefektivan kebijakan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh, maka disarankan kepada pihak penyelenggara program BSPS untuk kedepannya dapat meningkatkan kinerja baik dalam pemberian atau penyampaian informasi yang up to date tentang program BSPS kepada masyarakat, agar masyarakat lebih paham atau mengetahui tentang sasaran, tujuan dan target program bantuan BSPS, dengan cara melaksanakan sosialisasi secara kontinyu.
- 2) Untuk mencapai tepat pelaksanaan, disarankan kepada pemerintah setempat agar dapat bekerjasama dalam mendukung pelaksanaan program BSPS. Bagi tim teknis kabupaten dan PPK program BSPS memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas petunjuk pelaksanaan program BSPS yang tertuang dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, tidak hanya sebatas rapat koordinasi dan evaluasi saja seperti apa yang dilakukan pada pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Sungai Pinyuh. Bila perlu, sanksi tegas tersebut bisa berupa penegak hukum untuk proses selanjutnya, sehingga dapat menjadi pembelajaran kepada oknum-oknum yang bermental korupsi
- 3) Dalam rangka pencapaian tepat target, maka disarankan ketepatan sasaran bantuan masih harus benar-benar diseleksi untuk masyarakat yang masuk dalam katagori miskin dan dapat

berlaku adil, jujur dan transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari masyarakat selaku kelompok sasaran (target group). Untuk lebih mengefektifkan kinerja pelaksana kebijakan dalam hal ini fasilitator sebagai tenaga teknis yang senantiasa berada dilokasi kegiatan BSPS harus dipilih dari masyarakat yang berdomisili di desa yang menjadi sasaran BSPS, dan pihak ketiga sebagai penyedia barang sebaiknya dipercayakan kepada badan usaha yang beralamat diwilayah kecamatan yang menjadi sasaran BSPS

- 4) Dalam rangka menciptakan tepat lingkungan maka disarankan terdapat peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin setelah menerima bantuan bedah rumah dibandingkan dengan sebelum menerima BSPS dari indikator kebersihan, ventilasi, luas bangunan, kualitas bahan, kerapian, dan kelengkapan ruangan, atau dengan kata lain dana bantuan sosial melalui program bedah rumah berperan signifikan terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin.

F. REFERENSI

Buku-Buku:

- Abidin, Zainal Said. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, Cetakan I.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Azwar. 2012. *Penelitian Kebijakan*. Malaysia: Makalah disampaikan pada Peretemuan peneliti Melayu Muda di Johor.
- Departemen Pendidikan RI. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Islamy, M. Iffan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kambun. 2013. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Suatu Teori)*. Yogyakarta: BPF.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan. Edisi I*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munir, Badrul. 2012. *Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: BAPPEDA Propinsi NTB.
- Nugroho, D. Riant. 2013. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara berkembang*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Riantnugroho. D. 2009. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samudra. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, UGM.
- Dokumen Pemerintah:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 07/PRT/M/2018, tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*